

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang saling berkaitan, yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan publik. Para ilmuwan politik dan sosial telah mengembangkan teori pembuatan keputusan dalam rangka pembuatan kebijakan publik. Ada tiga teori pembuatan keputusan, yaitu teori rasional komprehensif, teori inkremental, dan *mixed scanning theory*.

Adapun tahapan maupun langkah-langkah kebijakan publik, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut, William N. Dunn dalam Abidin mengemukakan bahwa proses dari kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
  - a. Penetapan agenda
  - b. Perumusan kebijakan
  - c. Penerimaan kebijakan
  - d. Pelaksanakan kebijakan
  - e. Pengkajian kebijakan
  - f. Perbaikan kebijakan
  - g. Penerusan kebijakan

- h. Pengakhiran kebijakan.<sup>9</sup>
2. Menurut James Anderson, telah menetapkan langkah-langkah kebijakan, yaitu:
- a. Formulasi masalah, yaitu suatu tindakan pemahaman masalah dengan melakukan pencermatan terhadap perubahan di lingkungan.
  - b. Formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh pembuatan kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk dicari solusinya. Dapat dikatakan suatu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
  - c. Penentuan kebijakan, yaitu proses dimana pemerintah telah menentukan pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
  - d. Implementasi kebijakan, yaitu proses dalam melaksanakan kebijakan sehingga mencapai tujuan tertentu.
  - e. Evaluasi kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan tidak dilakukan di tahap akhir saja, tetapi dilakukan seluruh proses kebijakan.

---

<sup>9</sup> Erika Revida, et. al., *Teori Administrasi Publik* ( Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 64.

3. Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh dalam Nawawi membagi lima tahapan kebijakan, yaitu:
  - a. Penyusunan agenda merupakan suatu metode dari masalah untuk dijadikan mendapatkan perhatian oleh pemerintah.
  - b. Formulasi kebijakan merupakan suatu proses perumusan masalah.
  - c. Pembuatan kebijakan merupakan suatu proses penentuan pilihan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
  - d. Implementasi kebijakan merupakan suatu penerapan kebijakan yang sudah dirancang agar mencapai tujuan tertentu.
  - e. Evaluasi kebijakan merupakan suatu penilaian dari implementasi kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah mencapai tujuan.<sup>10</sup>

## **B. Konsep Implementasi Kebijakan**

### **1. Pengertian implementasi kebijakan**

Kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau administrasi pemerintah. Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial

---

<sup>10</sup> Ibid., 65.

dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara.<sup>11</sup>

Dalam realita, mengenai pemahaman tentang makna implementasi kebijakan tidaklah sedemikian formal, linier, kaku, dan normatif. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi, prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan unruk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan di balik langkah seperti ini agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada rielnya. Dengan demikian, tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan dapat dicapai.<sup>12</sup>

Menurut pandangan para ahli-ahli dalam ilmu sosial, proses implementasi suatu kebijakan (pendidikan) berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tersebut.

---

<sup>11</sup> Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 131-132.

<sup>12</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 133.

Meskipun antara perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan, merupakan dua rangkaian proses yang saling berkesinambungan.

Implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Arif Rohman menjelaskan “sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu”.<sup>13</sup> Sedangkan, menurut Charles O. Jones menjelaskan “dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program”.<sup>14</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif saja, melainkan menyangkut faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung/tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya secara bersama dan saling bahu-membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tersebut.

## 2. Pendekatan dalam implementasi kebijakan

Beberapa ahli ilmu sosial ada empat pendekatan dalam implementasi kebijakan umumnya dan kebijakan pendidikan

---

<sup>13</sup> Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 105-108.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 109.

khususnya. Adapun pendekatan menurut Solichin adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan struktural

Pendekatan struktural ini bersifat top-down yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern. Dalam pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan pengasaan menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Adapun titik lemah dalam pendekatan ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.

b. Pendekatan prosedural dan manajerial

Pendekatan ini pada dasarnya dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pendekatan struktural. Pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi pelaksana yang cocok bagi implementasi program, melainkan dengan upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang tepat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, 110-111.

c. Pendekatan perilaku

Pendekatan ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai pelaksana, bukan pada organisasinya sebagaimana pendekatan struktural dan manajerial.

d. Pendekatan Politik

Pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat mempelancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan, dengan pendekatan politik memungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan.<sup>16</sup>

3. Faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

Suatu kebijakan akan menemui banyak masalah pada tahap pengimplementasiannya, karena itu alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan harus dapat diimplementasikan. Jika, dalam suatu kebijakan terjadi kegagalan, maka perlu dikaji kembali apakah perumusan masalah kebijakan tersebut memang buruk atau kesalahan dalam mengimplementasikan. Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah

---

<sup>16</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 102-103.

satu tahap penting dalam menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya.<sup>17</sup>

### C. Konsep Kelompok Mata Pelajaran PAI

Menurut Rifqi Amin mengungkapkan “Pendidikan Agama Islam adalah penanaman nilai-nilai keislaman secara utuh dan universal oleh diri peserta didik.”<sup>18</sup> Selain itu, Pendidikan Agama Islam (PAI) juga punya peran dalam penanaman nilai-nilai karakter yang dinyatakan dengan perilaku melekat sehingga menjadi pedoman hidup. Bukan hanya pedoman hidup dalam beribadah secara normatif, namun juga pedoman hidup dalam arti yang luas terutama ketika menghadapi berbagai permasalahan kehidupan yang semakin dinamis dan kompleks.<sup>19</sup>

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan

---

<sup>17</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 41.

<sup>18</sup> A Rifqi Amin, *Sistem Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 5.

<sup>19</sup> A Rifqi Amin, *Sistem Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 5. Pernyataan tersebut hampir sama substansinya menurut Mohammad Ali sebagai Direktur Jendral Pendidikan Islam pada tahun 2009 disampaikan bahwa: “Adakah Islam dikaji sebagai objek keilmuan sebagaimana disiplin yang lain, atukah Islam dijadikan rujukan pandangan hidup ataupun akidah untuk mempelajari dan menjalani kehidupan? Yang ideal mestinya kedua aspek itu diintegrasikan menjadi satu pendekatan yang utuh sekalipun pada prakteknya banyak kendala yang harus diselesaikan karena setiap pilihan yang diambil akan berimplikasi pada metodologi serta target akhir yang hendak dicapainya”. M. Abduh Malik, dkk., *Materi Pembelajaran Mata Kuliah: Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum* (Jakarta: Departemen Agama Dirjen Pendidikan Islam, 2010), 5.

yang lebih tinggi.<sup>20</sup> Di Madrasah dalam materi Pendidikan Agama Islam (PAI) terbagi menjadi empat mata pelajaran, antara lain:

#### 1. Akidah Akhlak

Pembelajaran Akidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah Swt. Pembelajaran akidah akhlak ini lebih menekankan aspek afektif, baik nilai kemanusiaan maupun ketuhanan dan pembelajaran ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Akidah Akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang Akidah dan Akhlak Islam.<sup>21</sup>

#### 2. Fiqih

Mata pelajaran Fiqih adalah mata pelajaran bermuatan Pendidikan Agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara' dan membimbing peserta didik agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum Islam. Tujuan dari pembelajaran Fiqih adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syari'ah dalam kehidupan. Sedangkan, tujuan dari penerapan aturan-aturan pada mata pelajaran Fiqih untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter taqwa dan menciptakan kemaslahatan bagi

---

<sup>20</sup> Ibid, 168.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 313.

manusia. Pembelajaran Fiqih di MTs bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli.<sup>22</sup>

### 3. Al-Qur'an Hadits

Pembelajaran Al-Qur'an Hadits merupakan unsur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada MTs yang memberikan pendidikan kepada peserta didik supaya dapat memahami isi Al-Qur'an dan Hadits serta penerapan nilai-nilai dalam kehidupannya. Mata pelajaran Al-Qur'an Hadits bertujuan untuk meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur'an Hadits, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits dan meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>23</sup>

### 4. Sejarah Kebudayaan Islam

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami dan menghayati Sejarah Kebudayaan Islam. Salah satu tujuan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk pendidikan akhlak, selain itu agar peserta didik dapat membaca sejarah-sejarah Islam terdahulu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Rafi'i, Pembelajaran Fiqih (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), 3.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, 316.

<sup>24</sup> Ibid., 318.

#### **D. Konsep Panduan Kurikulum Darurat**

##### 1. Pengertian kurikulum darurat

Menurut SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Kurikulum Darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan. Masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa darurat wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19), tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadi bencana alam, huru-hara dan sebagainya. Panduan Kurikulum Darurat ini membahas mengenai mekanisme pembelajaran yang dapat dijadikan acuan oleh satuan pendidikan dan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran selama masa darurat.

##### 2. Konsep kurikulum darurat

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 mengamanatkan agar kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan disusun dan dikembangkan: (a) dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, (b) sesuai dengan jenjang pendidikan dan (c) dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip diverifikasi tersebut, pemerintah dapat cukup memberikan panduan yang bersifat umum terkait gambaran pendidikan yang perlu

dilakukan, sedangkan wujud kurikulum yang dijalankan dapat disusun oleh setiap satuan pendidikan. Dengan demikian pemerintah tidak lagi harus selalu menetapkan kurikulum yang bersifat nasional. Kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan penyusunannya dapat diserahkan di tingkat satuan pendidikan dalam bentuk Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) sebagai wujud penerapan manajemen berbasis madrasah terutama pada masa darurat. Konsep kurikulum darurat, antara lain sebagai berikut:

- a. Kurikulum Darurat ini disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat. Oleh karena itu, semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat yang terdapat dan dirasakan oleh setiap satuan pendidikan madrasah. Mempertimbangkan kondisi darurat setiap daerah dan madrasah berbeda, maka implementasi kurikulum darurat setiap satuan pendidikan bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
- b. Dalam menyusun Kurikulum Darurat, satuan pendidikan dapat melakukan modifikasi dan inovasi KTSP, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan madrasahnyanya. Madrasah dapat melakukan modifikasi dan inovasi dalam bentuk struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar dan lain sebagainya. Misalnya dalam satu hari dibatasi hanya mengajar

dua atau tiga mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran utama, peminatan dan lain sebagainya.

- c. Pada masa darurat, seluruh siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari madrasah. Kegiatan pembelajaran tidak hanya mengandalkan tatap muka antara guru dengan siswa, tetapi siswa dapat melakukan belajar dari rumah dengan bimbingan/pemantauan oleh guru dan orang tua.
- d. Belajar dari rumah tidak harus memenuhi tuntutan kompetensi (KI-KD) pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian dan kesalehan sosial lainnya.
- e. Kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali secara normal seperti biasanya.

### 3. Pembelajaran masa darurat

- a. Kegiatan pembelajaran Madrasah pada masa Darurat tetap berpedoman pada Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Misalnya, untuk Tahun Pelajaran 2020/2021, Pembelajaran dimulai bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni 2021 sesuai SK Dirjen Pendidikan Islam No 2491 Tahun 2020 Tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021.

- b. Bila kondisi darurat sedang berlangsung dan ditetapkan sebagai masa darurat oleh pemerintah maka proses pembelajaran di madrasah mengikuti mekanisme kurikulum darurat yang ditetapkan pada ketentuan ini.
- c. Kegiatan pembelajaran bukan untuk mencapai ketuntasan Kompetensi Dasar (KD) kurikulum semata, namun lebih mentitikberatkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan dan kesalehan sosial lainnya.
- d. Kegiatan pembelajaran masa darurat melibatkan guru, orang tua, peserta didik dan lingkungan sekitar.
- e. Kegiatan pembelajaran harus dapat mengembangkan kompetensi peserta didik pada aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.
- f. Kegiatan pembelajaran harus menumbuhkembangkan kompetensi literasi bahasa, literasi sains, literasi media, literasi teknologi dan literasi visual.
- g. Kegiatan pembelajaran harus dapat merangsang tumbuhnya 4C (*Critical thinking, Collaborative, Creativity dan Communicative*) pada diri siswa.
- h. Kegiatan pembelajaran wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan civitas akademik madrasah baik pada aspek fisik maupun psikologi

4. Prinsip pembelajaran masa darurat
  - a. Pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka, tatap muka terbatas, atau pembelajaran jarak jauh, baik secara *Daring* (dalam jaringan) dan *Luring* (luar jaringan).
  - b. Pembelajaran dapat berlangsung di madrasah, rumah dan di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi masing-masing madrasah.
  - c. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah, berbasis kompetensi, keterampilan aplikatif, dan terpadu.
  - d. Pembelajaran perlu berkembang secara kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif siswa.
  - e. Pembelajaran menekankan nilai guna aktivitas belajarnya untuk kehidupan riil siswa, orang lain atau masyarakat sekitar, serta alam lingkungan tempat siswa hidup.
  - f. Pembelajaran yang berlangsung agar mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat.
  - g. Pembelajaran yang berlangsung agar menerapkan nilai-nilai, yaitu memberi keteladanan yang perilaku belajar positif, beretika, dan berakhlakul karima (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan dan motivasi dalam belajar dan bekerja (*ing madyo*

*mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tutwuri handayani*).

- h. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
  - i. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.
  - j. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pembelajaran.
5. Materi, metode, media dan sumber belajar pada kurikulum darurat
- a. Pengembangan materi ajar

Guru dapat memilih materi pelajaran esensi untuk menjadi prioritas dalam pembelajaran. Sedangkan materi lain dapat dipelajari siswa secara mandiri.

- 1) Buku-buku sumber seperti buku siswa, buku pedoman guru, maupun buku atau literatur lain yang berkaitan dengan ruang lingkup yang sesuai dan benar.
  - 2) Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau berkaitan dengan fenomena sosial yang bersifat kontekstual, misalnya berkaitan dengan pandemi Covid-19 atau hal lain yang sedang terjadi di sekitar siswa.
- b. Model dan metode pembelajaran
- 1) Desain pembelajaran untuk memperkuat pendekatan berbasis ilmiah atau saintifik dapat berbentuk model-model

pembelajaran, seperti Model Pembelajaran Berbasis Penemuan (*Discovery Learning*), Model Pembelajaran Berbasis Penelitian (*Inquiry Learning*), Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*), Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*), dan model pembelajaran lainnya yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif dan kreatif.

- 2) Guru memilih metode yang memungkinkan pencapaian tujuan pembelajaran pada kondisi darurat.
- 3) Guru secara aktif mengembangkan metode pembelajaran aktif yang disesuaikan dengan karakteristik materi atau tema.

c. Media dan sumber belajar

Dalam media dan sumber belajar guru diharapkan kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan benda yang dapat dijadikan media agar dapat membantu tercapainya tujuan belajar. Contohnya media pembelajaran antara lain: gambar, peta, grafik, papan tulis, papan flanel, display, poster, bagan, dan sebagainya. Pemilihan media disesuaikan dengan materi atau tema yang diajarkan dan tagihan sesuai indikator dan tetap mempertimbangkan kondisi kedaruratan.

6. Pengelolaan kelas pada kurikulum darurat

- a. Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kelas nyata maupun kelas virtual.

- b. Madrasah yang berada pada zona hijau (aman) dapat melaksanakan kelas tatap muka. Sedangkan, madrasah yang berada dalam zona merah (darurat) melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau kelas virtual.
  - c. Bila dalam bentuk kelas nyata, dimana guru dan siswa bertemu tatap muka, maka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bila ruangan kelas tidak mencukupi, maka dapat dilaksanakan secara sifit pagi dan siang. Pengaturannya diserahkan kepada masing-masing madrasah sesuai dengan kondisi kedaruratan.
  - d. Bila dalam bentuk kelas virtual, maka madrasah atau guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital yang menyediakan menu atau pengaturan kelas virtual. *E-Learning* Madrasah dari Kementerian Agama atau aplikasi lain yang sejenis.
  - e. Bila kegiatan pembelajaran dalam bentuk kelas virtual, sebaiknya madrasah mengatur jadwal kelas secara proporsional, misalnya dalam sehari hanya ada satu atau dua kelas virtual, agar peserta didik tidak berada di depan komputer/laptop/HP seharian penuh. Selain itu juga menghemat penggunaan paket data internet.
7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran masa darurat
- a. Merencanakan pembelajaran
    - 1) Sebelum guru bersama siswa melakukan pembelajaran, maka guru wajib menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Sedapat mungkin RPP disusun dengan simple atau

sedarhana, mudah dilaksanakan, serta memuat hal-hal pokok saja.

- 2) Dalam menyusun RPP, guru harus merujuk pada SKL, KI-KD dan indikator Pencapaian yang diturunkan dari KD.
- 3) Guru dapat membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi yang akan diajarkan kepada peserta didik pada masa darurat.
- 4) Dalam setiap menyusun RPP, terdapat 3 (tiga) ranah yang perlu dicapai dan perlu diperhatikan pada setiap akhir pembelajaran, yaitu dimensi sikap, aspek pengetahuan dan aspek pengetahuan.
- 5) Dimensi sikap mencakup nilai-nilai spiritual sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Swt, mengamalkan akhlak yang terpuji dan menjadi teladan bagi keluarga masyarakat dan bangsa, yaitu sikap peserta didik yang jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, mandiri, percaya diri dan berkemauan kuat untuk mengimplementasikan hasil pembelajarannya di tengah kehidupan dirinya dan masyarakatnya dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik.
- 6) Dimensi pengetahuan yaitu memiliki dan mengembangkan pengetahuan secara konseptual, faktual, prosedural dan metakognitif secara teknis dan spesifik dari tingkat sederhana,

kongkrit sampai abstrak, kompleks berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya masyarakat sekitar, lingkungan alam, bangsa, negara dan kawasan regional, nasional maupun internasional.

- 7) Dimensi keterampilan yaitu memiliki keterampilan berfikir tingkat tinggi dan bertindak: kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif dan komunikatif serta mampu bersaing di era global dengan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
- 8) Setelah guru menyusun RPP dan disahkan oleh kepala madrasah, bila memungkinkan dan dinilai penting, maka RPP tersebut dapat dibagikan kepada orang tua siswa agar orang tua mengetahui kegiatan pembelajaran, tugas dan target capaian kompetensi yang harus dilakukan anaknya pada masa darurat.

b. Kegiatan pembelajaran

- 1) Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara daring, semi daring dan non-digital.
- 2) Aktivitas pembelajaran memperhatikan kondisi madrasah dan siswa untuk menjalankan pembelajaran secara daring, semi daring maupun non-digital (terutama MI).
- 3) Aktivitas pembelajaran mencakup kegiatan sebagai berikut:
  - a) Kegiatan pendahuluan
    - Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa

- Mengucapkan salam dan do'a bersama sebelum mulai pembelajaran
- Guru menyapa dengan menanyakan kondisi siswa dan keluarganya
- Guru melakukan *Pretest* secara lisan
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
- Guru menyampaikan lingkup materi pembelajaran

b) Kegiatan inti

- Guru mengorganisir siswa dalam pembelajaran
- Guru menyampaikan materi pelajaran dan mendiskusikan bersama siswa
- Siswa melakukan kegiatan saintifik yang meliputi: mengamati, menanya, mencari informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan
- Guru menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan karakteristik materi di masa darurat
- Hasil pekerjaan siswa dapat berupa video, animasi, portofolio, proyek, produk, gambar, keterampilan, puisi, cerpen dan lain sebagainya yang memungkinkan dilaksanakan siswa di masa darurat.
- Guru memberi apresiasi terhadap hasil karya siswa

- Guru melaksanakan penilaian sikap penilaian sikap selama aktivitas siswa belajar melalui pengamatan atau menanyakan kepada orang tua siswa.

c) Kegiatan penutup

- *Post test*, dapat dilakukan dengan tes dan non tes.
- Guru dan siswa melakukan refleksi dengan mengevaluasi seluruh aktivitas pembelajaran serta menyimpulkan manfaat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan
- Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi atau kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
- Penugasan, atau pekerjaan rumah jika diperlukan, dapat secara individu maupun kelompok. Dalam memberi tugas pekerjaan rumah, sedapat mungkin tidak menyita banyak waktu, tenaga dan biaya.
- Do'a penutup dan salam

8. Penilaian hasil belajar

Guru dalam merancang penilaian hasil belajar pada masa darurat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi atau juknis penilaian hasil belajar dari Kemenag RI dengan penyesuaian masa darurat.

- b. Penilaian hasil belajar dapat mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan
- c. Penilaian hasil belajar dapat berbentuk portofolio, penugasan proyek, praktek, tulis dan bentuk lainnya, yang diperoleh melalui tes daring atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan.
- d. Penilaian meliputi penilaian harian (PH), penilaian akhir semester (PAS) dan penilaian akhir tahun (PAT).
- e. Penilaian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu dipaksakan mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
- f. Pemberian tugas kepada siswa dan penilaian hasil belajar pada masa belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Pemberian tugas perlu proporsional atau tidak berlebihan, agar perlindungan kesehatan, keamanan, dan motivasi siswa selama masa darurat tetap terjaga.
- g. Hasil belajar anak dikirim ke guru bisa berupa foto, gambar, video, animasi, karya seni dan bentuk lain tergantung jenis kegiatannya dan memungkinkan diwujudkan di masa darurat.

- h. Dari hasil belajar tersebut, guru dapat melakukan penilaian baik dengan teknik skala capaian perkembangan, maupun hasil karya.
- i. Kemudian dianalisis untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar yang muncul lalu dilakukan skoring.<sup>25</sup>

#### **E. Konsep Pembelajaran Daring (dalam jaringan)**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya perkembangan teknologi komputer dan internetnya, berpengaruh terhadap berkembangnya konsep pembelajaran jarak jauh. Internet menjadi media yang sangat tepat dalam pembelajaran jarak jauh. Dengan teknologi ini informasi dan materi pembelajaran menjadi cepat sampainya. Pembelajaran jarak jauh akan efektif jika melibatkan interaksi antara pembelajar dengan pengajar, pembelajar dengan pembelajar, pembelajar dengan media pembelajaran.

Dalam *web based distance learning* pengajar dan pembelajar memerlukan fasilitas internet untuk tetap menjaga konektivitasnya sehingga dapat menentukan kesinambungan suatu pembelajaran jarak jauh. *Web based distance learning* sbagai suatu *internet based community* dapat memfasilitasi bertemunya atau berinteraksinya pembelajar dan pengajar.

Pembelajaran daring sangat dikenal di kalangan masyarakat dan akademik dengan istilah pembelajaran daring (*online learning*). Istilah lain yang sangat umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh (*learning*

---

<sup>25</sup> Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah, Jakarta: Pendidikan Islam, 2020.

*distance*).<sup>26</sup> Menurut Dogmen menjelaskan “pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar mandiri (*self study*)”.<sup>27</sup> Belajar mandiri diorganisasikan secara sistematis dalam menyajikan materi pembelajaran, pemberian bimbingan kepada pembelajar, dan pengawasan untuk keberhasilan pembelajar.<sup>28</sup>

Pembelajaran jarak jauh mencakup upaya yang ditempuh pembelajar untuk mewujudkan sistem pendidikan sepanjang hayat, dengan prinsip-prinsip kebebasan, kemandirian, keluwesan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam bidang pendidikan untuk menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran jarak jauh. Adapun prinsip pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, antara lain:

1. Tujuan yang jelas

Perumusan tujuan harus jelas, spesifik, teramati dan terukur untuk mengubah perilaku pembelajar.

2. Relevan dengan kebutuhan

Program pembelajaran jarak jauh relevan dengan kebutuhan, pembelajar, masyarakat, dunia kerja atau lembaga pendidikan.

---

<sup>26</sup> Albert Efendi Pohan, *Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah* (Purwodadi: Sarnu Untung, 2020), 2.

<sup>27</sup> Munir, *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 16-19. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan dimana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Sedangkan, menurut Isman, pembelajaran daring adalah pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Albert Efendi Pohan, *Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah* (Purwodadi: Sarnu Untung, 2020), 2.

<sup>28</sup> Meda Yuliani, dkk. *Pembelajaran Daring untuk Pendidikan: Teori dan Penerapan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 23.

3. Mutu pendidikan

Mutu proses pembelajaran yang ditandai dengan proses pembelajaran yang lebih aktif atau mutu pendidikan yang lebih produktif.

4. Efisien dan efektivitas program

Efisien mencakup penghematan dalam penggunaan tenaga, biaya, sumber dan waktu. Efektivitas memperhatikan hasil-hasil yang dicapai oleh lulusan, dampaknya terhadap program dan terhadap masyarakat.

5. Pemerataan dan perluasan kesempatan belajar

Khususnya bagi yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal karena jauh atau sibuk bekerja.

6. Kemandirian

Kemandirian baik dalam pengelolaan, pembiayaan, dan kegiatan belajar.

7. Keterpaduan

Mengharuskan adanya keterpaduan berbagai aspek seperti keterpaduan mata kuliah atau mata pelajaran secara multidisipliner.

8. Kesenambungan

Tugas tutor memberikan bantuan kepada pembelajar secara berkala ketika pembelajar menghadapi kesulitan dalam memahami materi dalam pembelajaran, mengerjakan tugas, latihan atau soal.<sup>29</sup>

Adapun keuntungan pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang bersifat mandiri dan interaktivitas tinggi, sehingga mampu meningkatkan

---

<sup>29</sup> Munir, *Pembelajaran Jarak Jauh.*, 24.

tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan teks, audio, video dan animasi. Sedangkan, kelemahan dari pembelajaran daring, yaitu kesehatan menjadi poin penting bagi kehidupan kita, pembelajaran daring dengan menggunakan media gadget/laptop yang cukup lama akan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan kita.<sup>30</sup>

#### **F. Konsep Pembelajaran Luring (luar jaringan)**

Luring adalah kepanjangan dari “luar jaringan” sebagai pengganti kata *offline*. Pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Disamping karena adanya keterbatasan dalam fasilitas belajar dengan online, maka pembelajaran luring tetap ada tujuannya agar peserta didik tetap mendapatkan hak pendidikan. Luring merupakan pembelajaran jarak jauh yang terlepas dari internet atau bersifat offline dengan penggunaan media ajar seperti modul, LKS, buku pelajaran, radio, maupun siaran TV nasional khusus edukasi. Pembelajaran luring juga memiliki kelebihan dan kelemahan antara lain:

1. Kelebihan: akses pembelajaran yang mudah, kesempatan siswa belajar mandiri, konsep pembelajaran yang bersifat fleksibel, dan memberikan kesempatan orang tua siswa memahami usaha guru dalam mengajar anak-anak.

---

<sup>30</sup> Meda Yuliani, dkk. *Pembelajaran Daring.*, 29.

2. Kelemahan: kreatifitas guru harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.<sup>31</sup>

## **G. *E-Learning* Dalam Pembelajaran Jarak Jauh**

### 1. Pengertian *E-Learning*

*E-Learning* terdiri dari huruf *e* yang merupakan singkatan dari *elektronik* dan kata *learning* yang artinya pembelajaran. Dengan demikian, *E-Learning* bisa diartikan sebagai pembelajaran dengan memanfaatkan bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Fokus paling dalam *E-Learning* adalah proses pelajarannya (*learning*) itu sendiri, dan bukan pada “*e*” (*elektronik*), karena elektronik sebagai alat bantu saja. Pelaksanaan *E-Learning* menggunakan bantuan audio, video dan perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya.

Istilah *E-Learning* dapat pula didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Definisi *E-Learning*, Munir menjelaskan “sebenarnya sangatlah luas bahkan sebuah portal yang menyediakan informasi tentang suatu topik dapat tercakup dalam lingkup *E-Learning* ini”.<sup>32</sup> Dalam teknologi *E-Learning*, semua proses

---

<sup>31</sup> Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Covid-19* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 107.

<sup>32</sup> Munir, *Pembelajaran Jarak Jauh.*, 169.

pembelajaran yang biasa didapatkan di dalam sebuah kelas dilakukan secara *live* namun *virtual*.<sup>33</sup>

## 2. Karakteristik *E-Learning*

Adapun karakteristik *E-Learning* antara lain:

- a. Memanfaatkan jasa elektronik.
- b. Memanfaatkan media komputer, seperti jaringan komputer.
- c. Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri.
- d. Materi pembelajaran dapat disimpan di komputer.

## 3. Manfaat *E-Learning*

Manfaat *E-Learning* dengan penggunaan internet, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh, antara lain:

- a. Pengajar dan pembelajar dapat berkomunikasi secara mudah dan cepat melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu.
- b. Dengan *E-Learning* dapat menjelaskan materi pembelajaran yang sulit dan rumit menjadi mudah dan sederhana.
- c. Mempermudah mengakses atau memperoleh banyak informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
- d. Membuat pusat perhatian dalam pembelajaran.

---

<sup>33</sup> Gilang, *Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Era Covid-19* (Banyumas: Lutfi Gilang, 2020), 22. *live* namun *virtual* yang artinya pada saat yang sama seorang pengajar mengajar di depan sebuah komputer yang ada di suatu tempat, sedangkan pembelajar mengikuti pembelajaran tersebut dari komputer lain di tempat yang berbeda. Munir, *Pembelajaran Jarak Jauh* (Bandung: Alfabeta, 2011), 170.

- e. Memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi pembelajar dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

#### 4. Kelebihan dan kelemahan *E-Learning*

Penggunaan *E-Learning* untuk pembelajaran jarak jauh *online* sudah sering digunakan, karena ada beberapa kelebihannya yaitu:

- a. Meningkatkan interaksi pembelajaran (*enhance interactivity*).
- b. Mempermudah interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja (*time and place flexibility*).
- c. Memiliki jangkauan yang lebih luas (*potential to reach a global audience*).
- d. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (*easy updating of content as well as archivable capabilities*).<sup>35</sup>

Selain ada banyak manfaat dan kelebihannya, *E-Learning* dengan menggunakan internet untuk pembelajaran jarak jauh memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Terpisahnya secara fisik antara pengajar dan pembelajar.
- b. Menghambat pembentukan sikap, nilai (*value*), moral, atau sosial dalam proses pembelajaran, sehingga tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Proses pembelajaran lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau psikomotor dan kurang memperhatikan aspek afektif.

---

<sup>34</sup> Munir, *Pembelajaran Jarak Jauh.*, 170-171.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 174.

- d. Pengajar dituntut mengetahui dan menguasai strategi, metode, atau teknik pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mungkin selama pembelajar konvensional kurang dikuasainya.
  - e. Masalah keterbatasan ketersediaan *software* (perangkat lunak) yang biayanya masih relatif mahal.<sup>36</sup>
5. Penerapan aplikasi *E-Learning* dalam pembelajaran jarak jauh

Penerapan *E-Learning* diantaranya untuk pembelajaran online, terutama di perguruan tinggi, SMA/MA, dan SMP/MTs. Bahkan dalam *E-Learning* terdapat berbagai situs. Apalagi membuat situs *online* pada masa sekarang ini sangatlah mudah dengan memanfaatkan modul *Content Management Service* (CMS) yang sangat mudah untuk di instalasi dan dikelola seperti *modle*. *E-Learning* memberikan kemudahan untuk para pembelajar dalam memperoleh sumber referensi informasi yang bermutu langsung dari sumbernya seperti pengajar, para ahli/pakar, atau nara sumber lainnya. Selain itu, memberikan kesempatan juga kepada pembelajar untuk lebih peka dan kritis karena isi materi pembelajaran yang disajikan oleh pengajar bisa dikomentari atau dikritisi langsung. Bahkan pembelajar pun bisa memberikan apresiasi atau persepsinya dengan membuat tulisan khusus berkaitan dengan materi tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid., 176.

<sup>37</sup> Ibid., 179.

## H. Konsep Pembelajaran Jarak Jauh Sinkron dan Asinkron

Komunikasi sinkron dan asinkron memiliki arti yang berbeda. Komunikasi sinkron merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan dengan sistem komunikasi *real time* dan memiliki kedekatan. Pembelajaran sinkron terjadi ketika guru dan peserta didik melakukan komunikasi dalam waktu bersamaan tetapi di tempat yang berbeda, seperti percakapan online dan *video call*. Komunikasi sinkron ini membutuhkan partisipasi simultan dari semua peserta didik dan instruktur.<sup>38</sup>

Sedangkan, Komunikasi asinkron merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan tidak serempak, melalui media perantara. Pembelajaran asinkron ini terjadi ketika guru dan peserta didik berkomunikasi secara tidak langsung, di tempat maupun waktu yang berbeda. Sehingga peserta didik dapat mengerjakan tugas di lain waktu, seperti guru membuat rekaman video pembelajaran lalu diberikan kepada peserta didik. Komunikasi asinkron ini tidak membutuhkan partisipasi simultan dari semua peserta didik dan instruktur.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Amri Tanduklangi dan Carlina Amri, *Manajemen Sumber Daya Pembelajaran Bahasa Berbantuan Komputer* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 98.

<sup>39</sup> Ramen A Purba, dkk, *Media dan Teknologi Pembelajaran* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 56.

**Tabel 2.1**

**Perbedaan antara Komunikasi Sinkron dan Asinkron**

	<i>Komunikasi Sinkron</i>	<i>Komunikasi Asinkron</i>
<b><i>Kapan?</i></b>	Mendiskusikan isu yang kompleks, ajang berkenalan. Merencanakan tugas.	Merefleksikan isu yang kompleks. Digunakan ketika pertemuan sinkron tidak dapat dijadwalkan karena pekerjaan, urusan keluarga atau hambatan lainnya.
<b><i>Mengapa?</i></b>	Siswa menjadi lebih termotivasi karena mereka mendapat umpan balik yang instan.	Siswa mempunyai waktu yang lebih banyak untuk melakukan refleksi karena pengirim tidak mengharapkan jawaban langsung.
<b><i>Bagaimana?</i></b>	Menggunakan metode sinkron berarti siswa menggunakan video konferensi, pesan instan dan chat, yang berhubungan dengan pertemuan tatap muka.	Menggunakan metode asinkron berarti siswa menggunakan <i>email</i> , papan diskusi dan <i>blog</i> .
<b><i>Contoh</i></b>	Siswa yang bekerja dalam kelompok diharapkan untuk menggunakan pesan instan sebagai bantuan dalam pertukaran ide dan merencanakan tugas. Guru yang ingin menerangkan tentang konsep mungkin menggunakan video konferensi di dalam perkuliahannya.	Siswa yang sering memposting di <i>blog</i> mungkin akan diberi tanggung jawab untuk memelihara <i>blog</i> tersebut. Siswa diharapkan untuk membeigi pendapat mereka terhadap topik yang sedang dibahas. Serta mereka diharapkan untuk berpartisipasi di diskusi online dalam papan diskusi.

Pemilihan media untuk pembelajaran jarak jauh pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan pemilihan media untuk pembelajaran tatap muka, namun media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh harus

memenuhi kriteria berikut: dapat digunakan dan diakses semua peserta didik, dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, sesuai kebutuhan peserta didik, memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan dapat dikombinasikan dengan media lain sehingga dapat mengoptimalkan pembelajaran.

**Tabel 2.2**  
**Media yang dapat digunakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh (Sinkron dan Asinkron)**

	Pembelajaran Sinkron	Pembelajaran Asinkron
Visual		1. Rekaman video 2. Korespondensi
Audio	Konferensi audio	Rekaman Audio
Audio-Visual	1. Televisi Edukasi 2. Telekonferensi video 3. Intruksi sinkron berbasis web 4. Audiografi	1. Rekaman video 2. Pembelajaran berbasis komputer 3. Pembelajaran asinkron berbasis web 4. Televisi edukasi <sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid., 54-56.